

## **GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA LOKAL: STUDI KASUS MINI RANCH SAPI PASUNDAN, KABUPATEN CIAMIS**

**Dede Syahril Sidik<sup>1</sup>, Dwi Putri Vidiastuti<sup>2</sup>, Rifki Agung Kusuma Putra<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia <sup>1,3</sup>,*

*Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia <sup>2</sup>*

E-mail: [dedesyahrilsidik@unigal.ac.id](mailto:dedesyahrilsidik@unigal.ac.id), [putrividi@umm.ac.id](mailto:putrividi@umm.ac.id),

[rifkiagungkusumaputra@unigal.ac.id](mailto:rifkiagungkusumaputra@unigal.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Penguatan tata kelola pariwisata (good tourism governance) menjadi pendekatan strategis dalam mendorong pengembangan wisata lokal yang berkelanjutan dan partisipatif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dan aktor lokal dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pengembangan objek wisata Mini Ranch Sapi Pasundan di Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek kunci dalam strategi pengelolaan wisata, yang didukung oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMDes, dan masyarakat setempat. Meskipun terdapat keterbatasan dalam promosi digital dan kapasitas pelayanan, inisiatif pelatihan dan inovasi pelayanan telah mendorong terciptanya tata kelola yang lebih adaptif dan inklusif. Studi ini merekomendasikan perlunya kebijakan penguatan SDM pariwisata berbasis lokal yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.*

**Kata Kunci:** *Good Tourism Governance, Pemerintah Daerah, Penguatan SDM, Wisata Lokal, Mini Ranch Sapi Pasundan*

### **ABSTRACT**

*Strengthening tourism governance (good tourism governance) is a strategic approach in encouraging the development of sustainable and participatory local tourism. This study aims to analyze the role of local governments and local actors in implementing the principles of good governance, participation, accountability, transparency, and effectiveness in the development of the Pasundan Mini Ranch Sapi tourist attraction in Ciamis Regency. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that strengthening human resources (HR) is a key aspect in the tourism management strategy, supported by collaboration between local governments, BUMDes, and local communities. Although there are limitations in digital promotion and service capacity, training initiatives and service innovations have encouraged the creation of more adaptive*

*and inclusive governance. This study recommends the need for a local-based tourism HR strengthening policy that is integrated with the regional development planning system.*

**Keywords:** *Good Tourism Governance, Local Government, HR Strengthening, Local Tourism, Pasundan Mini Ranch Sapi*

## **PENDAHULUAN**

Sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang berkembang pesat dan menjadi kontributor signifikan bagi pendapatan nasional maupun daerah. Perubahan gaya hidup masyarakat, urbanisasi, dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam pola konsumsi wisatawan. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia didorong untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi dan tata kelola yang baik. Teviana (2022) menyatakan bahwa melimpahnya sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam sektor wisata alam, memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, jika dikelola secara optimal dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan Maghfiroh & Rahmatika (2021) yang menekankan pentingnya pengembangan potensi wisata sebagai strategi peningkatan perekonomian daerah.

Dalam konteks ini, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi elemen kunci dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan objek wisata. SDM yang kompeten mampu menciptakan layanan wisata yang berkualitas, mendukung pemasaran

digital, serta menghadirkan pengalaman wisata yang memuaskan. Oleh karena itu, penguatan SDM menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan good tourism governance, yakni penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam sektor pariwisata. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan BUMDes dan masyarakat lokal.

Konsep pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) menjadi bagian tak terpisahkan dalam kerangka good tourism governance. Yatmaja (2019) dan Herdiana (2019) menekankan bahwa pelibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan pariwisata berkontribusi pada penguatan kemandirian ekonomi dan pelestarian budaya lokal. Mardiyana et al. (2023) juga menyebutkan bahwa pariwisata merupakan bentuk usaha ideal yang dapat dilakukan masyarakat desa secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kabupaten Ciamis, khususnya wilayah utara, memiliki beragam potensi wisata yang sedang berkembang. Salah satu objek wisata unggulan adalah Mini Ranch Sapi

Pasundan di Desa Cibeureum, Kecamatan Sukamantri. Objek wisata ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta BUMDes Cibeureum, yang bertujuan mengembangkan potensi peternakan menjadi destinasi wisata edukatif. Namun, dalam praktiknya, tata kelola wisata ini masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya promosi digital, dan keterbatasan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan wisata yang profesional.

Permasalahan utama yang muncul adalah belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata dan lemahnya kapabilitas SDM lokal. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan, kurangnya inovasi, dan terbatasnya promosi yang berdampak langsung pada jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tata kelola pariwisata yang berbasis pada penguatan SDM secara berkelanjutan dengan dukungan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pembangunan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good tourism governance*, khususnya dalam hal penguatan SDM, dapat mendukung pengembangan wisata lokal di Mini Ranch Sapi Pasundan. Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu

pemerintahan, khususnya dalam aspek tata kelola pariwisata daerah berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa kepariwisataan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan negara, menciptakan kesejahteraan rakyat, dan memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, serta intelektual wisatawan. Selain itu, tujuan kepariwisataan meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan dan budaya, hingga penguatan identitas nasional dan hubungan antarbangsa.

Menurut Nurwahidah & Jamil (2022), pariwisata merupakan perpaduan berbagai pelayanan yang ditujukan untuk wisatawan dan berfungsi untuk mengidentifikasi serta mengelola dampak sosial, budaya, dan lingkungan secara regional. Hendriani dalam Rahmat et al. (2022) menyatakan bahwa pariwisata memiliki ruang lingkup luas yang mencakup wisata bahari, wisata pedesaan, wisata alam, wisata budaya, dan perjalanan bisnis. Munasef dalam Yuardani et al. (2021)

menambahkan bahwa pembangunan pariwisata adalah upaya terkoordinasi untuk menarik wisatawan melalui penyediaan fasilitas, barang, dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung.

Dalam konteks tata kelola, *good tourism governance* merupakan pendekatan yang menekankan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaan destinasi wisata (Bramwell & Lane, 2011; Hall, 2011). *Governance* dalam pariwisata tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga mendorong kolaborasi dengan masyarakat lokal dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pengelolaan yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting terutama dalam konteks wisata lokal berbasis komunitas yang mengandalkan sumber daya manusia dan kearifan lokal sebagai modal utama pengembangan destinasi.

Menurut Oka dan Yoeti (1999), pengembangan suatu daerah tujuan wisata harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat menjadi destinasi yang menarik dan berkelanjutan. Syarat tersebut antara lain: keberadaan daya tarik khas (alam, budaya, atau buatan), tersedianya fasilitas penunjang seperti penginapan, transportasi, dan sarana ibadah; tempat belanja oleh-oleh atau produk lokal; serta fasilitas umum vital seperti toilet, tempat makan, ATM, dan

akses jalan yang memadai. Semua elemen ini membutuhkan sistem tata kelola yang baik agar dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada pengalaman positif wisatawan.

Salah satu komponen utama dalam mewujudkan *good tourism governance* adalah penguatan sumber daya manusia (SDM). Teori modal manusia (*human capital theory*) yang dikembangkan oleh Gary Becker (1993, 2015) menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pariwisata, peningkatan kualitas SDM menjadi penting untuk menciptakan layanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan wisatawan.

Baum dan Kokkranikal (2005) juga menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan dalam industri pariwisata, termasuk keterampilan komunikasi, manajemen destinasi, dan pelayanan pelanggan, merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Dalam praktiknya, SDM yang adaptif dan inovatif akan mampu menjawab tantangan seperti kebutuhan wisata berbasis pengalaman, digitalisasi promosi, serta pengelolaan keluhan dan situasi darurat. Modal manusia tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pelatihan berbasis lapangan, pengalaman kerja, dan penguatan kapasitas lokal.

Namun, teori ini juga memiliki batasan, terutama dalam konteks

ketimpangan akses pendidikan dan pelatihan. Faktor-faktor eksternal seperti kesenjangan sosial, diskriminasi, dan minimnya dukungan kebijakan dapat menjadi hambatan bagi pemerataan hasil investasi SDM. Oleh karena itu, dalam kerangka good tourism governance, penguatan SDM harus didukung oleh kebijakan publik yang inklusif, berbasis kebutuhan lokal, dan dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BUMDes, dan komunitas masyarakat.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan wisata lokal, seperti Mini Ranch Sapi Pasundan, sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola pariwisata yang baik diterapkan secara konsisten, dengan SDM sebagai aktor kunci dalam mewujudkannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip good tourism governance dalam pengembangan wisata lokal, khususnya melalui penguatan sumber daya manusia di Mini Ranch Sapi Pasundan, Kabupaten Ciamis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi empirik secara holistik sebagaimana adanya di lapangan.

Sejalan dengan pendapat Moleong (2014), metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena

dari sudut pandang subjek penelitian melalui deskripsi mendalam dalam konteks yang alamiah. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terhadap proses, pola hubungan, dan dinamika tata kelola wisata yang melibatkan pemerintah daerah, BUMDes, dan masyarakat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pengelolaan dan pelayanan wisata, sedangkan wawancara ditujukan kepada informan kunci yang terlibat dalam pengelolaan destinasi. Studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri data sekunder dari berbagai sumber literatur yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Awal: Potensi dan Permasalahan Tata Kelola Wisata Mini Ranch**

Mini Ranch Sapi Pasundan, yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, merupakan destinasi wisata berbasis peternakan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata edukatif yang berbasis lingkungan dan budaya lokal. Letaknya yang strategis di wilayah utara Ciamis, dengan suasana pedesaan yang asri dan udara sejuk, menjadikannya ideal sebagai destinasi alternatif yang menawarkan keunikan tersendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Oka dan

Yoeti (1999) bahwa suatu destinasi wisata akan memiliki nilai jual apabila memiliki ciri khas atau daya tarik yang unik serta fasilitas pendukung yang memadai.

Mini Ranch didukung oleh lahan yang luas, keberadaan sapi lokal jenis Pasundan sebagai aset genetik unggul, serta infrastruktur dasar seperti kandang, padang rumput, dan aksesibilitas jalan. Namun demikian, berdasarkan temuan lapangan, pengelolaan destinasi ini masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Salah satu persoalan krusial adalah belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam aspek partisipasi masyarakat, akuntabilitas kelembagaan, dan transparansi informasi publik (UNDP, 1997).

Dalam praktiknya, masyarakat lokal belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, maupun evaluasi pengelolaan wisata. Sebagaimana dikemukakan oleh Murphy (1985), dalam community-based tourism, partisipasi aktif masyarakat lokal menjadi syarat utama bagi keberlanjutan sebuah destinasi, tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pemilik dan pengarah pembangunan. Namun dalam kasus Mini Ranch, peran masyarakat masih terbatas pada kegiatan operasional, tanpa dilibatkan dalam pengambilan kebijakan atau pengelolaan strategis

destinasi. Ini menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas dalam good tourism governance (Bramwell & Lane, 2011) belum sepenuhnya berjalan.

Permasalahan lain yang mencolok adalah keterbatasan kompetensi SDM. Meskipun masyarakat setempat memiliki pengalaman dalam bidang peternakan, sebagian besar dari mereka belum memiliki keterampilan dalam aspek pelayanan wisata, manajemen destinasi, dan komunikasi publik. Seperti dikemukakan oleh Baum & Kokkranikal (2005), kualitas pelayanan yang rendah berdampak langsung terhadap persepsi dan kepuasan wisatawan, serta memengaruhi daya saing destinasi. Kekurangan dalam hal pengetahuan hospitality, keterampilan problem solving, dan kemampuan promosi digital menunjukkan rendahnya investasi dalam modal manusia (Becker, 1993; 2015).

Selain itu, promosi wisata melalui media digital juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, menurut Govers, Go & Kumar (2007), kekuatan citra destinasi sangat ditentukan oleh kualitas promosi digital yang menarik dan kredibel, terutama di era pascapandemi di mana wisatawan cenderung mencari informasi melalui platform online. Mini Ranch belum memiliki sistem promosi digital yang terintegrasi dan strategi pemasaran konten yang memadai. Kurangnya penguasaan teknologi digital di kalangan pengelola dan minimnya dukungan pelatihan berbasis TI dari

pemerintah daerah menyebabkan keterbatasan ini menjadi penghambat utama dalam menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas.

Dari sisi kelembagaan, belum adanya payung hukum berupa peraturan desa (Perdes) atau dokumen perencanaan formal menyebabkan kegiatan pengelolaan wisata cenderung berjalan informal dan tidak memiliki standar tata kelola yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakefisienan dalam jangka panjang. Seperti dijelaskan oleh Hall (2011), sistem tata kelola pariwisata yang lemah secara institusional berisiko gagal membangun konsensus, kejelasan peran antaraktor, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Melalui kerangka collaborative governance (Ansell & Gash, 2007), tata kelola destinasi wisata idealnya melibatkan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku swasta dalam sebuah platform bersama untuk merumuskan kebijakan, menyusun rencana kerja, serta membangun kepercayaan lintas aktor. Namun, kondisi di Mini Ranch saat ini masih menunjukkan dominasi peran pemerintah tanpa sistem kolaborasi yang terstruktur. Hal ini menghambat proses penguatan kelembagaan lokal dan membatasi ruang partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, meskipun Mini Ranch Sapi Pasundan memiliki potensi besar secara geografis dan ekologis,

pengelolaannya masih menghadapi tantangan dari sisi kelembagaan, keterbatasan SDM, serta adaptasi terhadap teknologi informasi. Jika prinsip-prinsip good tourism governance tidak segera diinternalisasikan dalam sistem pengelolaan, maka keberlanjutan destinasi dan keterlibatan masyarakat lokal akan sulit diwujudkan secara maksimal.

## **2. Program Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Good Tourism Governance**

Dalam kerangka *good tourism governance*, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen strategis yang secara langsung memengaruhi kualitas tata kelola pariwisata. Hal ini sejalan dengan pandangan Baum dan Kokkranikal (2005), yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi tidak hanya ditentukan oleh daya tarik alam atau budaya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang menjalankan fungsi pelayanan, manajemen, dan komunikasi wisata.

Di Mini Ranch Sapi Pasundan, program penguatan SDM difokuskan pada enam aspek utama: peningkatan keterampilan pelayanan, pemahaman budaya lokal, kemampuan problem solving, inovasi dalam pelayanan, manajemen operasional, serta kompetensi digital dalam promosi dan branding. Inisiatif ini dipicu oleh rendahnya tingkat kesiapan SDM lokal dalam menghadapi tuntutan industri

pariwisata modern, terutama dalam hal pelayanan profesional dan pemanfaatan teknologi.

### **1) Peningkatan Keterampilan Pelayanan**

Keterampilan pelayanan menjadi aspek utama yang diperkuat melalui pelatihan langsung, simulasi, dan sistem mentoring antarstaf. Pelatihan ini meliputi teknik komunikasi, penanganan keluhan wisatawan, serta pemahaman terhadap standar hospitality. Hal ini selaras dengan teori modal manusia (Becker, 1993) yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas individu melalui pendidikan dan pelatihan berdampak langsung pada produktivitas dan kepuasan pelanggan.

Menurut Kandampully, Zhang, & Bilgihan (2015), kualitas layanan menjadi faktor utama dalam membentuk loyalitas wisatawan, sehingga peningkatan keterampilan pelayanan tidak hanya berdampak pada pengalaman pengunjung tetapi juga pada keberlanjutan destinasi. Di Mini Ranch, pengelola telah melaksanakan simulasi pelayanan untuk mengantisipasi keluhan pengunjung dan memastikan pengalaman positif, yang menunjukkan adanya upaya

penerapan prinsip efektivitas dalam tata kelola.

### **2) Pemahaman Budaya dan Adat Lokal**

Sebagai destinasi yang mengusung konsep wisata edukatif dan berbasis peternakan lokal, penguasaan terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi menjadi kunci dalam menciptakan keunikan destinasi. Menurut Arida dalam Risman et al. (2016), pariwisata berbasis budaya tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga menjadi sarana pelestarian identitas lokal. Mini Ranch mengintegrasikan unsur budaya melalui pertunjukan Rampak Gendang, penyajian kuliner khas, dan festival tahunan, yang sekaligus menjadi media promosi nilai-nilai lokal kepada wisatawan. Dalam konteks *good tourism governance*, pemahaman budaya oleh SDM lokal juga menunjukkan penerapan prinsip keadilan dan keberlanjutan, karena masyarakat diberi ruang untuk merepresentasikan budayanya sendiri dalam industri pariwisata.

### **3) Kemampuan Problem Solving**

Kemampuan menyelesaikan masalah menjadi indikator



penting dalam kesiapan operasional destinasi. Tantangan seperti lonjakan pengunjung, keterbatasan parkir, atau komplain pengunjung ditangani melalui pendekatan manajerial berbasis respons cepat. Seperti yang dinyatakan oleh Sigala (2008), SDM dalam industri pariwisata perlu dilatih untuk bersikap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi dinamika operasional yang kompleks.

Mini Ranch menerapkan sistem pemesanan online dan perencanaan jalur kunjungan untuk merespons kondisi padat pada musim liburan. Ini menunjukkan bahwa penguatan SDM tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam menjawab tantangan lapangan.

#### **4) Inovasi dalam Pelayanan Wisata**

Inovasi dalam pelayanan menjadi strategi pembeda untuk menciptakan pengalaman wisata yang menarik dan relevan. Menurut Hjalager (2010), inovasi pariwisata tidak selalu berupa teknologi tinggi, tetapi juga dapat berupa pendekatan baru dalam interaksi wisatawan dan penyedia jasa.

Mini Ranch mulai mengadopsi teknologi digital seperti

reservasi online dan layanan informasi wisata berbasis Augmented Reality (AR) atau korelasi yang sama dalam dunia maya dengan dunia nyata. Apa yang ada dalam media sosial itu merupakan bukti nyata wisata yang ada di Mini Ranch. Upaya ini menunjukkan bahwa inovasi telah menjadi bagian dari orientasi pelayanan dan memperkuat aspek keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi.

#### **5) Manajemen Operasional dan Kelembagaan**

Manajemen operasional yang baik memerlukan sistem kerja yang efisien, jadwal yang terorganisir, serta koordinasi antartim yang solid. Penguatan kapasitas operasional mencakup pelatihan manajemen wisata, evaluasi SOP, serta peningkatan kesejahteraan staf. Sebagaimana diungkapkan oleh Gursoy, Chi, & Lu (2010), keterlibatan SDM dalam proses perencanaan dan evaluasi operasional berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja dan efektivitas pelayanan.

Di Mini Ranch, jadwal kegiatan wisata, rotasi staf, dan pemeliharaan fasilitas dilakukan secara terstruktur.

Ini menunjukkan bahwa dimensi tata kelola tidak hanya mencakup regulasi, tetapi juga manajemen kerja yang responsif dan terukur.

### **6) Pemasaran Digital dan Personal Branding**

Penguatan SDM juga mencakup kemampuan dalam membangun citra destinasi melalui media sosial, website, dan kolaborasi dengan influencer. Sejalan dengan teori promosi destinasi dari Gretzel et al. (2006), peran digital branding menjadi sangat penting dalam membentuk persepsi pengunjung terhadap kualitas dan keunikan destinasi.

Mini Ranch mengembangkan identitas visual, slogan, serta strategi konten di media sosial yang menekankan pengalaman edukatif dan kekeluargaan. Ulasan positif dari pengunjung juga menjadi bagian dari strategi branding berbasis testimoni.

### **3. Kolaborasi Pemerintah, BUMDes, dan Masyarakat dalam Tata Kelola Wisata**

Penerapan *good tourism governance* di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dari bagaimana kolaborasi lintas aktor dibangun dan dijalankan secara konsisten. Dalam konteks Mini Ranch Sapi Pasundan, kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes), dan masyarakat lokal menjadi fondasi penting dalam pengembangan destinasi berbasis komunitas. Konsep ini sesuai dengan pendekatan *collaborative governance* seperti yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), yang menekankan bahwa tata kelola kolaboratif melibatkan proses pengambilan keputusan bersama antaraktor publik dan nonpublik melalui proses yang formal, konsensus, dan deliberatif.

#### **1) Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator Kebijakan**

Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, berperan penting dalam membuka akses terhadap sumber daya, baik berupa lahan, fasilitas, maupun dukungan administratif dalam transformasi peternakan menjadi objek wisata edukatif. Fungsi pemerintah sebagai fasilitator kebijakan terlihat dalam upaya menyediakan infrastruktur dasar dan pembinaan terhadap BUMDes. Hal ini sejalan dengan pandangan Rhodes (1996) yang menjelaskan bahwa dalam *governance*, pemerintah tidak lagi menjadi aktor dominan tunggal, melainkan bagian dari jejaring pelaku yang bekerja sama dalam mengatur urusan publik.

Namun, peran pemerintah dalam hal regulasi dan perumusan kebijakan lokal seperti Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan wisata masih terbatas. Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab antarpihak, serta menghambat terciptanya sistem akuntabilitas yang transparan.

## **2) BUMDes sebagai Pengelola Teknis Destinasi**

BUMDes Cibeureum berperan sebagai operator utama yang mengelola operasional harian wisata Mini Ranch, termasuk pelayanan pengunjung, pengelolaan fasilitas, dan pengembangan program wisata edukatif. Keberadaan BUMDes dalam struktur tata kelola pariwisata lokal merupakan wujud dari pelibatan lembaga ekonomi desa dalam sistem pembangunan berbasis aset lokal (asset-based development).

Menurut Sutoro Eko (2015), BUMDes adalah instrumen penting untuk memperkuat ekonomi desa dan membangun kemandirian kelembagaan masyarakat. Dalam praktiknya, BUMDes di Mini Ranch telah menunjukkan inisiatif dalam merancang jadwal kegiatan

wisata, mengelola SDM lokal, serta membangun jejaring promosi sederhana. Namun demikian, tantangan terbesar BUMDes adalah kapasitas kelembagaan yang belum sepenuhnya profesional, minimnya pelatihan manajerial, dan keterbatasan dana operasional untuk ekspansi promosi maupun inovasi layanan.

## **3) Masyarakat Lokal sebagai Mitra Pelaksana**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata masih didominasi oleh pelibatan pada aspek teknis, seperti penyediaan produk lokal, kegiatan atraksi, dan layanan informal. Menurut teori community-based tourism (Murphy, 1985), keterlibatan masyarakat harus mencakup seluruh rantai nilai wisata, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar hasil pengembangan benar-benar mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai lokal.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan ruang dalam perumusan visi destinasi dan pengelolaan kelembagaan wisata secara setara. Prinsip partisipasi aktif sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (1997) dalam good

governance belum terwujud secara maksimal. Padahal, partisipasi substantif masyarakat merupakan syarat penting untuk menjamin keberlanjutan sosial dan kultural destinasi wisata (Scheyvens, 1999).

Dengan membangun tata kelola yang kolaboratif, Mini Ranch berpotensi menjadi model pengelolaan wisata edukatif berbasis komunitas yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tata kelola seperti inilah yang mencerminkan nilai-nilai utama *good tourism governanc* partisipatif, responsif, efektif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Wisata Berkelanjutan di Mini Ranch Sapi Pasundan Mini Ranch Sapi Pasundan sebagai objek wisata lokal yang berbasis peternakan edukatif menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi internal kelembagaan maupun eksternal dinamika pasar pariwisata. Dalam perspektif *good tourism governance*, destinasi wisata yang berkelanjutan memerlukan sistem pengelolaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan, memperkuat kapasitas lokal, serta menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Bramwell & Lane, 2011). Tantangan-tantangan yang dihadapi Mini Ranch dapat dikelompokkan ke dalam lima aspek utama: SDM, infrastruktur, promosi digital,

kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, keterbatasan kapasitas SDM menjadi masalah utama dalam manajemen pariwisata Mini Ranch. Meskipun telah dilakukan beberapa pelatihan, namun belum ada sistem pelatihan berkelanjutan yang terprogram dan terintegrasi. Sebagian besar staf dan mitra kerja berasal dari latar belakang non-pariwisata sehingga adaptasi terhadap standar layanan, promosi digital, dan pemanfaatan teknologi masih terbatas. Ini sejalan dengan pendapat Mankiw (2016) bahwa tanpa pelatihan berkelanjutan, investasi dalam modal manusia akan memberikan hasil yang timpang dan tidak merata di antara pelaku usaha.

Di sisi lain, adaptasi terhadap teknologi informasi dalam konteks promosi dan pelayanan juga menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terjawab. Rendahnya pemanfaatan media sosial, belum tersedianya sistem pemesanan daring (*online booking*), dan kurangnya produksi konten digital yang menarik menyebabkan potensi wisata ini belum dikenal secara luas. Padahal, menurut Gretzel et al. (2006), citra digital destinasi merupakan faktor kunci dalam menarik minat generasi wisatawan baru.

Meskipun Mini Ranch telah memiliki infrastruktur dasar, seperti kandang dan area padang rumput, namun sarana pendukung wisata seperti fasilitas sanitasi, tempat istirahat, jalur

pedestrian, papan informasi, dan zona edukasi masih minim. Menurut Oka dan Yoeti (1999), kenyamanan dan keamanan wisatawan sangat dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas umum yang baik. Kekurangan ini tidak hanya memengaruhi kualitas pengalaman wisatawan, tetapi juga memperlihatkan belum optimalnya aspek efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola destinasi.

Belum adanya regulasi desa seperti Peraturan Desa (Perdes) atau petunjuk teknis pengelolaan pariwisata menyebabkan tidak adanya kejelasan peran, tanggung jawab, dan alur pengambilan keputusan antarpihak. Ini menjadi tantangan serius dalam membangun sistem akuntabilitas yang adil dan transparan. Menurut Hall (2011), destinasi wisata yang tidak memiliki struktur tata kelola formal akan kesulitan mengembangkan rencana jangka panjang yang berkelanjutan dan cenderung bergantung pada individu atau inisiatif ad hoc.

Selain itu, belum tersedia mekanisme evaluasi atau sistem monitoring yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data. Padahal, dalam tata kelola pariwisata yang baik, sistem umpan balik (feedback loop) dari pengunjung dan mitra sangat penting untuk merancang perbaikan layanan dan program pelatihan yang lebih tepat sasaran (Gursoy & Rutherford, 2004). Di sisi lain, terdapat peluang besar yang

dapat dikembangkan untuk memperkuat keberlanjutan Mini Ranch. Pertama, keberadaan sapi Pasundan sebagai ikon genetik lokal dapat dikembangkan sebagai identitas destinasi berbasis local branding. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam produksi kuliner, kerajinan, dan penyediaan jasa wisata membuka peluang penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata (rural tourism value chain).

Ketiga, kerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi, kelompok pemuda, dan komunitas digital dapat mempercepat transformasi promosi dan inovasi destinasi. Menurut Hjalager (2010), kemitraan antara pelaku lokal dan institusi eksternal merupakan kunci dalam membangun sistem inovasi pariwisata daerah. Keempat, peluang pengembangan wisata edukatif dan konservasi alam (green tourism) melalui pendekatan interpretasi lingkungan dan integrasi peternakan dengan pertanian organik membuka ruang bagi konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism), yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga konservasi alam dan budaya. **Kebutuhan Rencana Strategis Kolaboratif Jangka Panjang**

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Mini Ranch membutuhkan rencana strategis jangka panjang yang memadukan visi pembangunan desa, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengelolaan sumber daya yang adil. Dibutuhkan penyusunan dokumen tata

kelola bersama (governance charter), penguatan jejaring mitra, dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan partisipatif.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan Mini Ranch dapat mengarah pada good tourism governance yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga inklusif, profesional, dan berbasis pada pemberdayaan lokal yang berkelanjutan (UNWTO, 2019).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good tourism governance dalam pengembangan wisata lokal di Mini Ranch Sapi Pasundan masih berada dalam tahap awal dan menghadapi sejumlah tantangan struktural serta kultural. Potensi wisata berbasis peternakan dan budaya lokal sangat besar, namun belum diimbangi dengan tata kelola yang inklusif, efektif, dan terstruktur.

Dari hasil analisis, terdapat lima temuan utama: Potensi Mini Ranch sebagai destinasi edukatif sangat besar, tetapi masih terkendala oleh rendahnya kapasitas SDM, belum optimalnya promosi digital, dan minimnya regulasi kelembagaan. Penguatan SDM telah dilakukan melalui pelatihan, simulasi pelayanan, pemahaman budaya lokal, dan inovasi layanan, namun belum berkelanjutan dan belum terintegrasi dalam sistem manajemen kelembagaan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMDes, dan masyarakat telah

berjalan, tetapi masih bersifat informal dan belum didukung oleh sistem koordinasi serta regulasi tata kelola yang kuat. Tantangan utama dalam pengembangan berkelanjutan adalah keterbatasan infrastruktur, ketiadaan peraturan desa tentang tata kelola wisata, serta lemahnya sistem evaluasi.

Peluang pengembangan terbuka lebar melalui penguatan branding lokal, digitalisasi promosi, pengembangan wisata edukasi, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan dan komunitas kreatif. Secara keseluruhan, implementasi good tourism governance di Mini Ranch membutuhkan perbaikan mendasar dalam aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, pemberdayaan SDM, dan kolaborasi lintas aktor.

Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan desa (Perdes) yang mengatur tata kelola wisata berbasis masyarakat secara spesifik, termasuk mekanisme koordinasi, pembagian peran, dan sistem akuntabilitas. Penguatan SDM harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan manajemen destinasi, layanan wisata, promosi digital, serta pelestarian budaya lokal, dengan melibatkan lembaga pendidikan dan mitra eksternal. BUMDes sebagai pengelola utama perlu diperkuat kapasitas kelembagaannya melalui pelatihan keuangan, pemasaran, dan pelayanan publik berbasis pariwisata.

Promosi digital dan branding Mini Ranch perlu ditingkatkan secara profesional, termasuk pengembangan

situs web resmi, sistem reservasi online, konten media sosial yang aktif, dan kerja sama dengan influencer pariwisata lokal. Perlu disusun roadmap pengembangan jangka panjang berbasis good tourism governance yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan dan kemandirian destinasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 571.
- Baum, T., & Kokkranikal, J. (2005). Human resource management in tourism: A small island perspective. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Becker, G. S. (2015). Human Capital and the Economy. *Journal of Economic Perspectives*, 29(4), 5-10.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jumpa*, 6(1), 63–86.
- Hjalager, A.M., 2010. *A review of innovation research in tourism*. *Tourism Management*, 31, 1-12.
- Kandampully, J., Zhang, T. & Bilgihan, A. 2015. *Customer Loyalty: A Review and Future Directions with a Special Focus on the Hospitality Industry*. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 27, 379- 414.
- Magfiroh, & Rahmatika, A. N. (2021). Strategi Pengembangan Wisata Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada New Normal (Studi Kasus Di Agrowisata Bale Tani Jombang). *LOSARI: Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman*, 02(01), 18–34. <https://doi.org/10.33096/losari.v5i2.76>
- Mardiyana, E., Gusnadi, D., & Raharjo, T. P. (2023). Peran Community Based Tourism Dalam Mendukung Kampung Jelekong Sebagai Desa Wisata Seni Dan Budaya. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/6282%0Ahttps://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/download/6282/4786>
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics*. 9th Edition. Worth Publishers.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya
- Nurwahidah, & Jamil, M. (2022).

- Pengembangan Community-Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Objek Wisata Pantai Leuge Aceh Timur). *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 7–13. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.478>
- Raharja, D. T., Putra, H. S. A., & Yoga, A. (2020). *Penguatan SDM dalam e-Marketing untuk Promosi Desa Wisata di Kabupaten Malang*. 140–151.
- Rahmat, A., Novianti, E., Khadijah, U. L. S., Dienaputra, R. D., & Nugraha, A. (2022). Pengembangan Agrowisata Melalui Pendekatan Community Based Tourism di Desa Mirat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat. *PARAHITA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 8–16. <https://doi.org/10.25008/parahita.v3i1.57>
- Risman, A., Wibhawa, B., & Fedryansyah, M. (2016). Kontribusi Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13622>
- Sigala, M. (2008). A Supply chain management approach for investigating the role of tour operators on sustainable tourism: the case of TUI. *Journal Of Cleaner Production*, 16(15), 1589-1599
- T. Teviana. (2022). Tourism Potential Development Strategy Aek Milas Sosopan Sipirok. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 155–161. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.8363>
- UNWTO. (2019). *UNWTO Tourism Definitions*. Madrid: World Tourism Organization
- Yatmaja, P. T. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10 (1), 27-36
- Yuardani, A. M., Heriyanto, H., Qadri, U., Rinaldi, H., Wana, D., Tandra, R., Sulaiman, S., & Prestoroika, E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendampingan untuk Pengembangan Pariwisata pada Desa Sungai Kupah. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 176–185. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.239>